

Kegalauan Demokrasi Pendidikan

Oleh: Juster Donal Sinaga



PENDIDIKAN kita belum demokratis. Amanat UUD 1945 yang menyiratkan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia belum terwujud. Pendidikan belum dapat dirasakan merata oleh generasi muda bangsa ini. Masih ada sebagian kecil dari anak-anak bangsa ini belum dapat menikmati pendidikan. Sekian ratus gedung sekolah yang tidak layak disebut sekolah. Sekian ribu siswa yang ke sekolah tanpa sepatu dan tanpa buku pelajaran.

Pendidikan kita juga telah menciptakan kelas-kelas yang temboknya semakin kokoh antara sekolah orang kaya dan sekolah orang miskin. Pendidikan kita belum terbebas dari praktek-praktek curang tidak bermoral. Hasil pendidikan kita belum mencerminkan pribadi yang cerdas dan berkarakter. Tawuran, bullying, pemerkosaan, begal, penggunaan narkoba, korupsi, penipuan, dan bentuk-bentuk perilaku negatif lain masih jamak dilakukan oleh produk pendidikan kita.

Tantangan pendidikan

Dewasa ini, pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang berat. *Pertama*, cara pandang masyarakat dan para pengambil kebijakan yang masih salah terhadap pendidikan. Masih ada masyarakat dan para pengambil kebijakan pendidikan memandang pendidikan sebagai sosok yang sakral apapun bentuknya. Cara pandang seperti ini memandang pendidikan dengan sendirinya pasti membawa masyarakat kepada kemakmuran dan kesejahteraan tidak peduli sistem, bentuk, dan kurikulumnya. Artinya, pendidikan dianggap sebagai obat mujarab segala penyakit kebodohan dan kemiskinan masyarakat, tidak peduli sistem pendidikan yang dianut, kurikulum yang digunakan, dan kualitas pendidikan yang mengajar. Pandangan inilah yang disebut penyakit pedagogisme (Tilaar, 2012).

Kedua, masuknya budaya korporasi dalam sistem pendidikan. Dewasa ini pendidikan dijadikan sebagai salah satu komoditas per-

dagangan. Hill (2010) menyatakan bahwa pendidikan dewasa ini telah menjelma menjadi bisnis. Terdapat tiga agenda besar di bidang pendidikan yang dicanangkan oleh para kapitalis pelaku bisnis pendidikan di negara maju, yaitu: (1) memproduksi dan mereproduksi angkatan kerja dan generasi warga negara sebagai konsumen yang cocok dengan kepentingan akumulasi modal, (2) melicinkan jalan bagi usaha mencari untung secara langsung dari pendidikan, dan (3) merencanakan korporasi bisnis pendidikan internasional untuk mengeruk keuntungan dari kegiatan menjual jasa pendidikan, dengan mendirikan kampus-kampus jauh atau *franchising*, menjual kurikulum bekerjasama dengan korporasi lokal di negara lain.

Ketiga, berlakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Mulai tahun 2015 era MEA akan diterapkan. Pada era tersebut akan masuk tenaga ahli dari negara Asean lain. Demikian juga tenaga ahli terbaik negara ini dapat dengan mudah direkrut oleh perusahaan atau lembaga pendidikan di negara Asean lain. Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia akan dimasuki pengajar dari negara lain yang berdampak pada proses pembelajaran di ruang kelas akan meninggalkan rasa nasionalisme.

Sejatinya pendidikan bertujuan membangun manusia Indonesia mewujudkan Indonesia masa depan, yaitu masyarakat Indonesia yang demokratis dan berkeadilan dengan nasionalisme yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan demokrasi pendidikan dan pendidikan yang demokratis.

Menurut Tilaar (2012: 1110), demokrasi sistem pendidikan kita didasarkan pada empat prinsip, yaitu (1) pengakuan atas hak asasi ma-

nesia untuk memperoleh pendidikan. Setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Setiap rakyat harus diberi akses untuk mendapatkan pendidikan. (2) Sistem pendidikan yang ter-

buka. Setiap rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Menolak pandangan neoliberalisme dalam pendidikan yang terlalu menekankan pada persaingan.

(3) Pendidikan yang menghargai perbedaan kemampuan. Artinya, membuka pintu pendidikan kepada seluruh masyarakat dengan tetap menghargai keunikan setiap individu. Kesempatan diberikan kepada setiap individu pembelajar sesuai dengan kemampuannya. (4) Tujuan pendidikan adalah manusia yang cerdas dan bermoral. Tidak ada anak yang lahir ke dunia dalam keadaan cerdas ataupun bermoral. Setiap anak terlahir dengan potensi cerdas dan bermoral. Menjadikan manusia cerdas dan bermoral adalah tugas pendidikan.

Pendidikan demokratis

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut kiranya perlu merefleksikan kembali untuk menghadirkan demokrasi pendidikan dengan Pancasila sebagai fondasinya di ruang-ruang kelas. Keunggulan nilai-nilai Pancasila adalah mengakui peran ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia, mengakui adanya keunggulan kehidupan berdemokrasi yang dibimbing nilai-nilai ketuhanan dan pengakuan terhadap Sang Pencipta yang mengatur kehidupan manusia.

Pendidikan demokratis dapat diwujudkan dalam dua bentuk. *Pertama*, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan demokratis pada hakikatnya membebaskan manusia dari kebodohan. Kebodohan menghantar manusia pada fanatisme pada

nilai-nilai yang tidak menghargai keberagaman sebagai salah satu identitas Indonesia. Kebodohan juga dapat menghantar manusia pada kemiskinan. Masyarakat yang miskin akan sulit dibawa menjadi masyarakat demokratis. Kemiskinan akan menghantar manusia pada kebodohan, kemalasan, konsumtif tidak memiliki prinsip, mudah terpengaruh, dan sikap-sikap negatif lainnya.

Kedua, pendidikan yang mengindonesiakan. Pendidikan demokratis mensyaratkan sikap menghargai perbedaan. Indonesia adalah negara yang plural. Pendidikan yang terjadi dalam kebersamaan dengan keberagaman merupakan identitas Indonesia. Pendidikan demokrasi yang hadir dalam nuansa beragam nilai dan budaya diharapkan akan membentuk peribadi yang Indonesia dengan nasionalisme yang tinggi. Pendidikan demokratis menghadirkan perbedaan sebagai kekayaan bukan sebaliknya menyeragamkan yang berbeda.

Ketiga, pendidikan yang membentuk manusia berkarakter dan bermoral. Manusia yang berkarakter dan bermoral merupakan manusia yang lengkap, artinya, manusia memiliki kecerdasan kognitif, dan kecerdasan moral, memiliki kemampuan dan kemauan yang lahir dari nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri untuk mengenal dan memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan martabatnya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi moral yang ditanamkan dalam pendidikan demokratis. Proses pendidikan demokratis adalah proses pendidikan yang dialogis, bahkan mengarah pada transformasi tindakan manusia yang tidak hanya mengubah tingkah laku individu, tetapi juga mengarahkan pada suatu perubahan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. ***

Juster Donal Sinaga MPd. Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling, FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.